



<http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

Sahala Purba¹, Winni Natalia Pardede², Paskaria Theofany br S. Milala³, Efa Kristina br Purba⁴, Maria Anjelina Santika Hutagaol⁵

Abstrak

Tingkat kemiskinan dan pengangguran selama lima tahun terakhir ini mengalami kenaikan, padahal pendapatan transfer setiap tahunnya mengalami kenaikan. Penelitian bertujuan menguji kinerja keuangan pemerintah daerah dari 8 rasio. Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013-2022. Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu indikator keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas PAD Kabupaten Karo menunjukkan nilai rata-rata sebesar 11,21%, 7,85%, 7,85%, dan 107,12%. Rasio efisiensi PAD. Tingkat efisiensi pajak daerah, tingkat efektivitas pajak, dan tingkat beban BUMD menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,16%, 108,07%, 0,63%, dan 2,75%. Berdasarkan metode analisis laporan keuangan pemerintah Karo tahun 2013-2022 diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah Karo secara umum sangat baik, efektif dan efisien.

Kata Kunci: Analisis Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Pemerintah Kabupaten, Rasio Keuangan

Poverty and unemployment rates have increased over the last five years, even though transfer income has increased every year. The research aims to examine the financial performance of local governments from 8 ratios. The object of this research is the Karo Regency Regional Government Financial Report for 2013-2022. Data collection techniques through documentation techniques. The data analysis technique used is financial indicators. The results show that the effectiveness level of PAD for Karo Regency shows an average value of 11.21%, 7.85%, 7.85%, and 107.12%. PAD efficiency ratio. The regional tax efficiency level, tax effectiveness level, and BUMD burden level show average values of 1.16%, 108.07%, 0.63%, and 2.75%. Based on the analysis method for the Karo government's financial reports for 2013-2022, it is known that the government's financial performance is generally very good, effective and efficient.

Keywords: Financial Report Analysis, Financial Performance, District Government, Financial Ratios

Article History:

Submitted/Received 20 May 2024

First Revised 16 Jul 2024

Accepted 1 Okt 2024

Publication Date 01 Dec 2024

*Correspondence E-mail:

sahala824@gmail.com

¹ Fakultas Ekonomi
Universitas Methodist
Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Program studi
Akuntansi

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah ...

Sahala Purba, Winni Natalia Pardede, Paskaria Theofany br S. Milala, Efa Kristina br Purba, Maria Anjelina Santika Hutagaol

PENDAHULUAN

Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan 2 UU: Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Urusan Fiskal antara Pemerintah Daerah dan Pusat. Atas disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berharap pemerintah segera memajukan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat daerah dengan pembangunan dan pelayanan publik. Angka ini disebabkan adanya desentralisasi yang memudahkan pemerintah dalam melakukan pengendalian sentralisasi. Pasca disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah yang dituntut untuk makin berperan aktif dalam mengurus urusan daerahnya sendiri. Otonomi daerah telah dijadikan sebagai konsep pembangunan seperti memberikan kekuasaan yang luas dari pusat kepada pemerintah daerah agar memperluas PAD. Tuntutan untuk meningkatkan PAD semakin baik, tergantung pada kekuasaan pemerintah pusat ke daerah. Sekalipun sisa pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah cukup memadai untuk membantu otonomi daerah, akan tetapi pemerintah daerah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD-nya serta lebih leluasa dalam menggunakan APBD tersebut. Dengan demikian, diharapkan ada banyak potensi sumber PAD yang bisa digali di wilayah ini. Keberhasilan praktik pemerintahan daerah salah satunya disebabkan oleh upaya keras pemerintah daerah saat melakukan mengelola keuangan sesuai dengan (Susilawati, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah adalah aktifitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, tanggungjawab, serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik secara transparan dan akuntabel merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tentu dilaksanakan sesuai atas peraturan yang berlaku memperoleh mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, seperti: Pemerintahan yang Bersih, Ekonomis, Efektif, Transparan, Responsif, Akuntabel dan Kebebasan menggunakan APBD-nya. Maka harapannya daerah bisa memaksimalkan potensi sumber PAD.

Pengguna Pelaporan Keuangan Daerah dapat melakukan analisis kinerja keuangan daerah untuk memahami kinerja pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah. Dapat perhitungan rasio keuangan harus diinterpretasikan sedemikian rupa maka kinerja keuangan dapat dievaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan. Kabupaten Karo merupakan bagian dari kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Secara administratif Kabupaten Karo terbentuk dari 17 kecamatan, 10 kelurahan serta 259 desa. Badan Aset Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Karo merupakan bagian pendukung Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah, bertugas mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi, penunjang di bidang pengelolaan harta kekayaan serta keuangan.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo

2018	2019	2020	2021	2022
437.702	460.870	500.921	5 31.519	563.660

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, 2024)

Kemiskinan yaitu ketidakmampuan sisi ekonomi memenuhi kebutuhan pangan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2016). Akibat

pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap bantuan pusat dalam pembiayaan operasional pemerintahannya maka terjadi Tingginya tingkat kemiskinan pada Kabupaten Karo. Ini terjadi akibat penyelenggaraan pemerintah belum mampu memanfaatkan SDA yang kaya, yang sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hingga saat ini pemerintah daerah masih terus bergantung pada bantuan pusat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang masih terus meningkat hingga tahun 2022 dari tahun 2018, dimana peningkatannya sebesar 125.958. Ini membuktikan bahwa pengembangan kabupaten masih belum berhasil karena dapat meningkatkan pengeluaran negara dalam membiayai pemerintah daerah baru.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Kabupaten Karo

2018	2019	2020	2021	2022
3.592	2.640	4.793	5.265	7.514

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, 2024)

Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang masuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya (Fahri et al., 2020). Tingkat pengangguran di Kabupaten Karo terus meningkat pada tahun 2019-2022 sebesar 4.874. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya suatu Peristiwa dimana munculnya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang mengakibatkan banyaknya pekerja dari luar kota yang dikenakan PHK dan kembali ke Kabupaten Karo sehingga menyebabkan tingkat pengangguran di Kabupaten Karo terus meningkat.

Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Karo dalam mendanai kegiatan di daerahnya sendiri masih tergolong sangat rendah sekali. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menjadi penyebab utama yang mempengaruhi PAD mengakibatkan banyak pemangku kepentingan daerah meminta bantuan dana operasional dari pemerintah pusat. Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah ini sudah dilakukan oleh (Kamaroellah, 2017), yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan masih sangat rendah, namun berbeda dengan penelitian (Silitonga et al., 2022) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan sangat tinggi.

Tingkat ketergantungan keuangan sebagian besar daerah terhadap pemerintah pusat mayoritas tergolong rendah sekali. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian (Melmbessy, 2022) dan (Kamaroellah, 2017) yang menyatakan tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tergolong sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti ini guna memahami, bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakatnya, serta dapat digunakan sebagai pertimbangan terhadap kinerja pemerintah daerah untuk periode berikutnya. Adapun yang menjadi gab dalam penelitian ini dari 8 rasio yang diteliti, tidak semua memiliki rasio yang sama antara lain yang dilakukan (Kamaroellah, 2022) yang meyakini bahwa tingkat kemandirian keuangan masih sangat rendah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Silitonga et al., 2022) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan sangat tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah ...

Sahala Purba, Winni Natalia Pardede, Paskaria Theofany br S. Milala, Efa Kristina br Purba, Maria Anjelina Santika Hutagaol

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Tingkat Kemandirian Keuangan daerah menyatakan kesanggupan fiskal pemerintah daerah dalam mendanai urusan pemerintahan, pembangunan, serta fasilitas bagi masyarakat, yang dinilai melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Jikwa et al., 2015). Besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah melalui sumber lain maupun pendapatan transfer menunjukkan Rasio Kemandirian Fiskal Daerah (RKKD). Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka bertambah tinggi pula kemandirian keuangan daerah tersebut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3.

Tolak ukur		
Tingkatan	Kapasitar Moneter	Pola Hubungan
0-25%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
25-50%	Rendah Sekali	Konstruktif
50-75%	Sedang	Parsifatif
75-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: (Halim, 2012)

Rasio Ketergantungan Fiskal Wilayah. Rasio Ketergantungan Fiskal Wilayah dihitung dengan membandingkan total pendapatan daerah sebesar pendapatan transfer dengan total pendapatan asli negara sebesar (Mahmudi, 2016). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan daerah tersebut makin bergantung pada pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.

Tolak Ukur	
Ketergantungan	Kapasitas Moneter
0-25%	Rendah Sekali
25-50%	Rendah
50-75%	Sedang
75-100%	Tinggi

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Tolok ukur tanggungjawab serta kewenangan yang diberi untuk pemerintah daerah oleh pemerintah pusat supaya mengoptimalkan dan mengelola pendapatan adalah rasio derajat desentralisasi fiskal. Rasio keuangan derajat desentralisasi menunjukkan tingkat tanggungjawab serta kewenangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan. Rasio ini membuktikan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD

maka semakin tinggi kesanggupan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.

Tolak Ukur	
Tingkatan	Keterangan
0-10%	Rendah Sekali
10-30%	Rendah
31-40%	Cukup
40-50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: (Bisma & Susanto, 2010)

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesanggupan pemerintah daerah untuk pencapaian pemasukan awal telah direncanakan melalui target yang sudah disusun berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya diwakili melalui rasio efektifitas. Tujuan Rasio efektifitas adalah membahas seberapa efektif kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kesanggupan pemerintah daerah mulai memobilisasi pendapatan PAD dengan tujuannya diketahui dalam rasio efektifitas PAD (Mahmudi, 2016).

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6.

Tolak Ukur	
Tingkat Efektifitas	Kapasitas Moneter
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja pemerintah daerah dapat dinyatakan efisien jika telah memenuhi sasaran yang ditentukan melalui dana yang digunakan sekecil mungkin (Kartika et al., 2016). Penghitungan rasio yaitu membandingkan biaya yang harus digunakan dari pemerintah daerah guna mendapatkan PAD dengan realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Jika tingkat rasio ini lebih kecil maka lebih efisien kinerja pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pengutipan PAD oleh (Halim, 2012)

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7.

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah ...

Sahala Purba, Winni Natalia Pardede, Paskaria Theofany br S. Milala, Efa Kristina br Purba, Maria Anjelina Santika Hutagaol

Tolak Ukur	
Tingkat Efisien	Kapasitas Moneter
<10%	Sangat Efisien
10-20%	Efisien
21-30%	Cukup Efisien
31-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: (Halim, 2012)

Rasio Efektifitas Pajak Daerah. Tolak ukur yang menjadi keberhasilan dari organisasi pada saat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan adalah Rasio efisiensi pajak daerah. Efektivitas adalah perbedaan hasil. Output adalah aktivitas kepada masyarakat dan bentuk yang dicapai melalui program kegiatan serta kebijakan (Mahsun, 2019a) Ulasan dampak pajak daerah merupakan pemaparan kesanggupan pemerintah daerah agar melaksanakan pajak daerah yang dirancang melalui ketetapan target menurut potensi daerah yang sebenarnya (Halim, 2012)

$$\text{Rasio Efektifitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Anggaran Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8.

Tolak Ukur	
Tingkat Efektifitas	Kapasitas Moneter
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Rasio Efisiensi Pajak Daerah. Tingkat efisiensi pajak daerah berkaitan dengan prosedur operasional. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika ada produk dibuat dengan sumber daya yang sesedikit mungkin. Efisiensi adalah perbandingan output dengan input. Output merupakan realisasi biaya agar menghasilkan pendapatan sekitar, sedangkan input realisasi pendapatan sekitar (Mahsun, 2019a) Kinerja pemerintah daerah pada saat pemungutan pajak daerah tergolong efisien jika rasio yang dicapai <10%, atau semakin rendah angka rasionya maka semakin efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 9.
Tolak Ukur

Keefesienan	Kapasitas Moneter
<10%	Sangat Efisien
10-20%	Efisien
21-30%	Cukup Efisien
31-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: (Mahsun, 2019b)

Rasio Derajat Kontribusi BUMD. Menurut UU NO. 23 Tahun 2014, Pasal 1 No. 40 dan UU No. 1 Tahun 2017 No. 54, BUMD adalah suatu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya milik Daerah. Rasio ini membantu menentukan kontribusi bisnis lokal terhadap pertumbuhan pemasukan. Rasio ini dihitung untuk membandingkan pemasuakn daerah dari olahan aset daerah dengan total PAD (Mahmudi, 2016).

$$\text{Rasio Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Laba BUMD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Analisis Rasio Keuangan adalah metode yang dipakai dalam penelitian ini, objek penelitiannya merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karo tahun 2013-2022. Pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Menghitungnya menggunakan data keuangan yang didapatkan. Datanya dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan teks dan gambar yang dapat memberikan penjelasan tentang kinerja keuangan, sesuai teori sumber (Gede & Artini, 2017) Yang menjadi indikator dalam penelitian ini selama periode 2013-2020 yaitu: rasio kemandirian, ketergantungan, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, efisiensi PAD, tingkat efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah dan rasio derajat kontribusi BUMD. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2013-2022 adalah data yang digunakan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Pemerintah. Diperoleh Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dari rasio kemandirian pemerintah cenderung meningkat selama periode 2013-2018. Rasio kemandirian keuangan wilayah terendah sebesar 5,82% pada tahun 2013, sedangkan rasio kemandirian keuangan tertinggi sebesar 16,91% pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019-2022, nilai tingkat kemandirian mengalami penyusutan yang cukup signifikan yaitu dari 13,66% menjadi 8,59%. Nilai rata-rata wilayah Kabupaten Karo masih tergolong sangat rendah sekali yaitu sebesar 10,74%.

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah ...

Sahala Purba, Winni Natalia Pardede, Paskaria Theofany br S. Milala, Efa Kristina br Purba, Maria Anjelina Santika Hutagaol

Rasio kemandirian pemerintah sangat rendah sekali dapat disebabkan pada sumber pendapatan daerah dimana pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah. Karena relatif rendahnya basis pajak / retribusi di daerah dan minimnya pendapatan asli daerah yang bisa diperoleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya. Hal ini juga memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah guna mencari sumber-sumber pembiayaan baru, baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.

Tabel 10. Rasio Kemandirian Kabupaten Karo Tahun 2013-2022

Tahun	Realisasi total		Rasio	Kemampuan Keuangan	Pola hubungan
	PAD	Pendapatan transfer			
2013	46.342.693.861,79	795.997.482.315,00	5,82%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
2014	72.914.095.471,05	918.228.028.727,00	7,94%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
2015	87.644.277.141,15	1.073.522.368.832,00	8,16%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
2016	99.909.477.299,16	1.100.042.266.114,00	9,08%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
2017	157.866.720.976,13	959.269.973.779,00	16,46%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
2018	159.189.197.472,28	941.257.217.088,00	16,91%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
2019	117.683.657.832,91	861.506.117.288,00	13,66%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
2020	100.334.824.835,96	861.506.117.288,00	11,65%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
2021	108.359.804.241,19	1.182.790.080.704,00	9,16%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
2022	97.474.399.998,64	1.134.570.816.041,00	8,59%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif
Rata-rata	104.771.914.913,03	982.869.046.817,60	10,74%	Sangat Rendah Sekali	Insruktif

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan rasio ketergantungan mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2013-2022. Tingkat ketergantungan fiskal daerah tertinggi tahun 2017 dengan nilai alokasi sebesar 10,86% dan alokasi terendah sebesar 5,10% ditahun 2013. Dengan rata-rata yaitu 7,83%. Rasio ini masih dalam kategori rendah sekal. Disebabkan karena realisasi pad terlalu kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah tahun 2013-2022.

Tabel 11. Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo tahun 2013-2022

Tahun	Realisasi total PAD	Total pendapatan daerah	Rasio	Ketergantungan
2013	46.342.693.861,79	909.311.459.027,79	5,10%	Rendah Sekali
2014	72.914.095.471,05	1.010.908.170.173,05	7,21%	Rendah Sekali
2015	87.644.277.141,15	1.470.455.672.993,15	5,96%	Rendah Sekali
2016	99.909.477.299,16	1.456.336.375.056,16	6,86%	Rendah Sekali
2017	157.866.720.976,13	1.453.205.992.340,13	10,86%	Rendah Sekali
2018	159.189.197.472,28	1.495.138.180.332,28	10,65%	Rendah Sekali

Tahun	Realisasi total PAD	Total pendapatan daerah	Rasio	Ketergantungan
2019	117.683.657.832,91	1.424.075.254.493,91	8,26%	Rendah Sekali
2020	100.334.824.835,96	1.267.968.330.965,96	7,91%	Rendah Sekali
2021	108.359.804.241,19	1.354.732.695.023,19	8,00%	Rendah Sekali
2022	97.474.399.998,64	1.305.951.350.254,64	7,46%	Rendah Sekali
Rata-rata	104.771.914.913,03	1.314.808.348.066,03	7,83%	Rendah Sekali

Sumber : (Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara (BPK), 2024)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Hasil penelitian menunjukkan rasio ketergantungan mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2013-2022. Tingkat ketergantungan fiskal daerah tertinggi pada tahun 2017 alokasi nilai sebesar 10,86% dan nilai terendah sebesar 5,10% tahun 2013. Dengan rata-rata yaitu 7,83%. Rasio ini tergolong kategori rendah sekali.

Tabel 12. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Karo tahun 2013-2022

Tahun	Realisasi total PAD	Total pendapatan daerah	Rasio	Keterangan
2013	46.342.693.861,79	909.311.459.027,79	5,10%	Rendah Sekali
2014	72.914.095.471,05	1.010.908.170.173,05	7,21%	Rendah Sekali
2015	87.644.277.141,15	1.470.455.672.993,15	5,96%	Rendah Sekali
2016	99.909.477.299,16	1.456.336.375.056,16	6,86%	Rendah Sekali
2017	157.866.720.976,13	1.453.205.992.340,13	10,86%	Rendah
2018	159.189.197.472,28	1.495.138.180.332,28	10,65%	Rendah
2019	117.683.657.832,91	1.424.075.254.493,91	8,26%	Rendah Sekali
2020	100.334.824.835,96	1.267.968.330.965,96	7,91%	Rendah Sekali
2021	108.359.804.241,19	1.354.732.695.023,19	8,00%	Rendah Sekali
2022	97.474.399.998,64	1.305.951.350.254,64	7,46%	Rendah Sekali
Rata-rata	104.771.914.913,03	1.314.808.348.066,03	7,83%	Rendah Sekali

Sumber : (Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara (BPK), 2024)

Rasio Efektivitas PAD. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa tingkat rasio efektivitas PAD Kabupaten Karo dari tahun 2013 – 2022 adalah sangat efektif. Nilai rasio tertinggi untuk efektivitas PAD sebesar 112,14% pada tahun 2019, dan nilai rasio terendah sebesar 94,18% tahun 2013. Dengan nilai rerata sebesar 107,25%. Sehingga rasio ini tergolong kategori sangat efektif.

Tabel 12. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Karo tahun 2013-2022

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio	Kemampuan Keuangan
2013	46.342.693.861,79	49.208.823.587,00	94,18%	Cukup Efektif
2014	72.914.095.471,05	67.343.577.486,00	108,27%	Sangat Efektif
2015	87.644.277.141,15	80.957.198.437,00	108,26%	Sangat Efektif
2016	99.909.477.299,16	94.040.149.949,00	106,24%	Sangat Efektif

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah ...

Sahala Purba, Winni Natalia Pardede, Paskaria Theofany br S. Milala, Efa Kristina br Purba, Maria Anjelina Santika Hutagaol

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio	Kemampuan Keuangan
2017	157.866.720.976,13	144.607.633.410,00	109,17%	Sangat Efektif
2018	159.189.197.472,28	149.284.495.038,00	106,63%	Sangat Efektif
2019	117.683.657.832,91	104.940.113.732,00	112,14%	Sangat Efektif
2020	100.334.824.835,96	89.505.868.847,00	112,10%	Sangat Efektif
2021	108.359.804.241,19	89.880.571.148,00	120,56%	Sangat Efektif
2022	97.474.399.998,64	102.652.692.857,00	94,96%	Cukup Efektif
Rata-rata	104.771.914.913,03	97.242.112.449,10	107,25%	Sangat Efektif

Sumber : (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Perbedaan antara cukup efektif dan sangat efektif dalam pengelolaan PAD dapat terjadi karena beberapa faktor: Pemantauan dan Evaluasi: Pemerintah daerah yang sangat efektif dalam mengelola PAD mungkin memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih canggih. Mereka mungkin menggunakan teknologi informasi untuk melacak penerimaan pendapatan secara real-time dan menganalisis kinerja secara terperinci. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Pemerintah daerah yang sangat efektif mungkin telah berhasil diversifikasi sumber pendapatan mereka. Mereka tidak hanya bergantung pada satu atau dua jenis pajak atau retribusi, tetapi memiliki portofolio pendapatan yang lebih beragam, seperti pajak properti, pajak restoran, retribusi izin usaha, dan lain sebagainya. Penegakan Hukum dan Penghindaran Pungutan: Pemerintah daerah yang sangat efektif dalam mengelola PAD mungkin memiliki sistem penegakan hukum yang kuat terhadap penghindaran pajak dan pungutan ilegal. Mereka juga mungkin aktif dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Pemerintah daerah yang sangat efektif mungkin telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Mereka dapat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan memastikan bahwa proses pembayaran pajak berjalan lancar dan mudah.

Rasio Efisiensi PAD. Hasilnya menunjukkan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Karo berfluktuasi cukup besar dalam kurun waktu 2013-2022, dengan kenaikan dan penurunan setiap tahun. Rasio efisiensi PAD tertinggi dicapai tahun 2016 sebesar 1,50%, dan terendah sebesar 0,09% tahun 2013. Nilai rata-rata rasio efisiensi PAD 1,16 % berarti tergolong kategori Sangat efisien.

Tabel 13. Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Karo tahun 2013-2022

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi PAD	Rasio	Kemampuan Keuangan
2013	41.333.542,00	46.342.693.861,79	0,09%	Sangat Efisien
2014	1.053.346.302,00	72.914.095.471,05	1,44%	Sangat Efisien
2015	1.279.757.479,00	87.644.277.141,15	1,46%	Sangat Efisien
2016	1.494.272.507,00	99.909.477.299,16	1,50%	Sangat Efisien
2017	1.809.676.115,00	157.866.720.976,13	1,15%	Sangat Efisien
2018	1.724.193.514,00	159.189.197.472,28	1,08%	Sangat Efisien
2019	1.567.301.758,00	117.683.657.832,91	1,33%	Sangat Efisien

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi PAD	Rasio	Kemampuan Keuangan
2020	1.236.746.146,00	100.334.824.835,96	1,23%	Sangat Efisien
2021	174.133.038,00	108.359.804.241,19	0,16%	Sangat Efisien
2022	188.304.132,00	97.474.399.998,64	0,19%	Sangat Efisien
Rata-rata	1.275.828.420,38	105.235.618.111,30	1,16%	Sangat Efisien

Sumber : (Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara (BPK), 2024)

Rasio Efektivitas Pajak Daerah. Dari hasil didapatkan bahwa hubungan efektivitas pajak daerah Kabupaten Karo mengalami fluktuasi cukup besar tahun 2013 hingga tahun 2022. Setiap tahun dilakukan penambahan dan penghapusan. Tingkat efisiensi pajak daerah tertinggi dicapai pada tahun 2020. Yaitu meningkat 123,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio terendah terjadi pada tahun 2013 sebanyak kasus atau 88,47%. Nilai rata-rata rasio efektifitas PAD sebesar 106,81% menunjukkan masuk dalam kategori sangat efektif.

Tabel 14. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Karo tahun 2013-2022

Tahun	Realisasi Pajak		Rasio	Kemampuan Keuangan
	Daerah	Pajak Daerah		
2013	18.101.033.469,10	20.459.930.000,00	88,47%	Cukup Efektif
2014	28.842.756.405,10	28.023.050.000,00	102,93%	Sangat Efektif
2015	31.942.650.685,25	29.953.546.000,00	106,64%	Sangat Efektif
2016	35.355.210.937,81	31.428.010.000,00	112,50%	Sangat Efektif
2017	46.957.708.248,00	40.794.923.500,00	115,11%	Sangat Efektif
2018	44.899.919.736,22	41.536.923.500,00	108,10%	Sangat Efektif
2019	44.412.242.579,84	41.501.733.384,00	107,01%	Sangat Efektif
2020	36.711.550.305,76	29.658.744.720,00	123,78%	Sangat Efektif
2021	41.673.800.323,31	42.147.205.800,00	98,88%	Cukup Efektif
2022	51.640.157.978,00	49.340.187.500,00	104,66%	Sangat Efektif
Rata-rata	38.053.703.066,84	35.484.425.440,40	106,81%	Sangat Efektif

Sumber : (Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara (BPK), 2024)

Rasio Efisiensi Pajak Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Karo dari tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 4,67%. Tingkat efisiensi pajak daerah tertinggi sebesar dicapai pada tahun 2013 yaitu 4,85%. Karena pada hasil audit dari BPK SUMUT tahun 2015-2022 tidak ada dicantumkan maka biaya pemungutan pajak daerah pada tahun 2015-2022 tidak dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Karo sehingga rasio efisiensi pajak daerahnya tidak dapat diketahui. Nilai rata-rata Rasio Efisiensi Pajak Daerah 0,50%, sehingga tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Karo sebesar termasuk dalam kategori Sangat efisien.

Tabel 15. Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Karo tahun 2013-2022

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio	Kemampuan Finansial
-------	-------------------------------	------------------------	-------	---------------------

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah ...

Sahala Purba, Winni Natalia Pardede, Paskaria Theofany br S. Milala, Efa Kristina br Purba, Maria Anjelina Santika Hutagaol

2013	878.216.877,00	18.101.033.469,10	4,85%	Sangat efisien
2014	51.669.110,00	28.842.756.405,10	0,18%	Sangat efisien
2015	-	31.942.650.685,25	-	-
2016	-	35.355.210.937,81	-	-
2017	-	46.957.708.248,00	-	-
2018	-	44.899.919.736,22	-	-
2019	-	44.412.242.579,84	-	-
2020	-	36.711.550.305,76	-	-
2021	-	41.673.800.323,31	-	-
2022	-	51.640.157.978,00	-	-
Rata-rata	92.988.598,70	38.053.703.066,84	0,50%	Sangat efisien

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Rasio Derajat Tingkat Kontribusi BUMD. Hasil kajian realisasi rasio kapasitas keuangan pajak daerah terhadap biaya pemungutan pajak daerah membuktikan nilai dari rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten Karo dari tahun 2013-2022 cenderung menurun. Tingkat iuran tertinggi BUMD tercatat pada tahun 2013 sebesar 5,83% dan tingkat iuran terendah BUMD tercatat sebesar 1,18% pada tahun 2017. Dengan nilai rerata 2,71%.

Tabel 16. Rasio Derajat Tingkat Kontribusi BUMD Kabupaten Karo tahun 2013 - 2022

Tahun	Laba BUMD	Realissi PAD	Rasio
2013	2.701.109.902,00	46.342.693.861,79	5,83%
2014	1.648.336.721,00	72.914.095.471,05	2,26%
2015	2.641.709.774,00	87.644.277.141,15	3,01%
2016	2.523.504.082,00	99.909.477.299,16	2,53%
2017	1.858.953.256,00	157.866.720.976,13	1,18%
2018	4.214.712.386,00	159.189.197.472,28	2,65%
2019	2.429.190.829,00	117.683.657.832,91	2,06%
2020	2.526.770.335,00	100.334.824.835,96	2,52%
2021	2.337.315.998,00	108.359.804.241,19	2,16%
2022	2.808.927.287,00	97.474.399.998,64	2,88%
Rata-rata	2.569.053.057,00	104.771.914.913,03	2,71%

Sumber : (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian sangat rendah sekali. Namun jika realisasi PAD tidak mampu mengimbangi pendapatan transfer, maka nilai alokasi akan cenderung meningkat setiap tahun. Daerah perlu meningkatkan PAD agar realisasi PAD lebih besar. Dengan demikian, maka riset tidak sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan (Silitonga et al., 2022) dimana peneliti ini melakukan penelitian di Kabupaten Langkat dan memperoleh rata-rata rasio sangat tinggi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan total penghasilan transfer yang diterima pendapatan daerah beserta total pendapatan daerah. Walaupun nilai Ketergantungan Fiskal wilayah selalu mengalami fluktuasi, namun nilai rata-

rata Ketergantungan Fiskal wilayah di Kabupaten Karo tergolong rendah sekali. Hasil analisis, tingkat ketergantungan keuangan daerah masuk dalam kategori "lemah". Hal ini menunjukkan pemerintah tidak daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam keuangannya. Maka riset ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Silitonga et al., 2022) dan (Melmambessy, 2022) yang menyatakan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang diteliti sangat tinggi.

Dari hasil analisis, rasio desentralisasi fiskal termasuk dalam kategori rendah sekali yang mewakili tingkat desentralisasi fiskal daerah. Maka riset ini sejalan terhadap penelitian oleh (Kamaroellah, 2017) menyatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal masih sangat kurang. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua daerah belum mampu menerapkan desentralisasi fiskal.

Walaupun terdapat variasi yang cukup besar pada skor efektivitas PAD, skor rerata rasio efektivitas PAD Kabupaten Karo termasuk atas kategori sangat efektif. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Kabupaten Karo sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi efektivitas PAD lebih besar dari pada anggaran PAD dan angka ini perlu ditingkatkan. Nilai tarif efektif PAD cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga meningkatkan realisasi pendapatan asli pedesaan selama tahun terakhir. Maka riset sejalan dengan (Ayem, 2015) dimana penelitian ini meneliti di Kabupaten Bantul dengan rasio rata-ratanya sangat efektif.

Meskipun terdapat variasi yang cukup besar pada skor efisiensi PAD, skor rasio efisiensi PAD Kabupaten Karo juga termasuk kategori sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Karo dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efisien antara tahun 2013-2022 untuk mencapai pendapatan yang optimal. Maka riset ini sejalan terhadap penelitian dari (Moridu, 2021) dan (Purba, 2017) yang menyatakan tingkat efisiensi pendapatan asli dari daerah yang diteliti sangat tinggi.

Walaupun nilai efektivitas pajak daerah cukup bervariasi, namun tingkat rerata efektivitas pajak daerah Kabupaten Karo berada pada kategori sangat efektif. Dari hasil analisis, rasio efisiensi pajak daerah tergolong dalam kategori kekuatan. Nilai tingkat efisiensi pajak daerah sangat bervariasi. Dari hasil penelitian, rasio ini dapat menjadi kekuatan, karena kapasitas fiskal sangat efektif dalam penerapan pajak daerah. Maka riset ini sejalan terhadap penelitian (Gede & Artini, 2017) dimana peneliti ini melakukan penelitian di Kabupaten Bandung memperoleh rata-rata rasio sangat efektif, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jamain & Mahadi, 2021) yang menyatakan bahwa pajak daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat adalah efektif.

Nilai rasio efisiensi pajak wilayah Kabupaten Karo pada tahun 2013-2014 juga menunjukkan penurunan dan masuk dalam kategori sangat efisiensi. Angka ini menunjukkan bahwa upaya untuk menghasilkan pendapatan dari pajak daerah sudah maksimal. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis rasio ini adalah potensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan efisiensi perolehan pendapatan dari PAD dan pajak daerah. Maka riset ini sejalan dengan penelitian dari (Yakub et al., 2022) dimana peneliti ini melakukan penelitian di Kalimantan timur memperoleh rata-rata rasio efisien.

Kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Karo tahun 2013-2022 rata-rata per tahun 2,71% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kontribusi BUMD nya cukup tinggi. Kontribusi BUMD Kabupaten Karo tahun 2013-2022 mengalami perubahan setiap tahunnya (fluktuasi). Keterlibatan BUMD dalam meningkatkan perekonomian daerah masih kurang. Seharusnya menjadi salah satu sumber PAD, BUMD belum membuat daerah mandiri

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah ...

Sahala Purba, Winni Natalia Pardede, Paskaria Theofany br S. Milala, Efa Kristina br Purba, Maria Anjelina Santika Hutagaol

secara fiskal. Perekonomian daerah masih tergantung pada dana transfer pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Tanan, C. I., & Duri, 2018) dimana peneliti melakukannya di Kota Jayapura rasio rata rata BUMD cukup tinggi.

KESIMPULAN

Pada tahun 2013-2022, tingkat kemandirian ekonomi pada kabupaten di wilayah Karo rata-rata sebesar 11,21%, sehingga dikatakan masih rendah. Persentase ketergantungan ekonomi memiliki rata-rata sebesar 7,85%. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan nilai rata-rata sebesar 7,85%, dan dapat dikatakan rasio PAD terhadap tingkat realisasi BUMD Kabupaten Karo Desentralisasi fiskal termasuk dalam kategori sangat rendah. Tingkat efektivitas PAD mempunyai rata-rata sebesar 107,12% yang tergolong sangat efektif. Rasio efisiensi PAD memiliki nilai rata-rata sebesar 1,16% termasuk kategori Sangat efisiensi. Rasio efektivitas pajak daerah mempunyai nilai rata-rata sebesar 108,07% termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efisiensi pajak daerah memiliki nilai rata-rata 0,63% yang masuk dalam kategori sangat efisiensi. Tingkat kontribusi BUMD nilai rata-ratanya sebesar 2,75% yang menunjukkan kontribusi BUMD sangat baik.

Pemerintah harus optimalkan retribusi wilayah yang memperkuat proses pemungutan, misalnya dengan dipercepat pengembangan peraturan daerah, mengubah tarif sejalan dengan perkembangan perekonomian bisa meningkatkan Rasio kemandirian Pemerintah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Pemerintah Kabupaten Karo dapat meningkatkan pendapatan seluruh wilayah dengan mengembangkan sektor pariwisata yang tidak hanya berfokus terhadap wilayah tertentu akan tetapi dapat memperluas wisata di wilayah lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo hendaknya terus melaksanakan evaluasi diseluruh pengeluaran yang dilakukan seta efisien melaksanakan belanja. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Karo terlebih dahulu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan data dan membuat sistem yang terintegrasi untuk membantu mengidentifikasi wajib pajak yang tidak patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, yoduke & sri. (2015). analisis efektivitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bantul tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 28–47.
- Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara (BPK). (2024). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. (2024). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo*.
- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010). evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun anggaran 2003-2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Fahri, Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–60.
- Gede, L., & Artini, S. (2017). Analisa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.)*. Penerbit Salemba Empat.
- Jamain, T. H., & Mahadi, W. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah Serta

- Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Management and Accounting Expose*, 4(2), 80–90. <https://doi.org/10.36441/mae.v4i2.428>
- Jikwa, E., Salle, A., & Layuk, paulus k. allo. (2015). analisis kemampuan keuangan daerah pemerintah kabupaten jayapura. *Jurnal Keuda Vol.2 No.3 Issn 2477-7838*, 2(3), 1–17.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Kamaroellah, R. A. (2022). *analisis tingkat kemapuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah*.
- Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2016). an analysis of independency ratio, local revenue effectiveness ratio, and local revenue efficiency ratio of the budget realization report in sukabumi agency. *Jurnal Sosial Humaniora Issn 2087-4928 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2026 | 143, 7(2)*, 143.
- Kusumastuti Wardana, L., F. R. & S. D. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2)(91–98).
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Mahsun, M. (2019a). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.
- Mahsun, M. (2019b). Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9. In *Universitas Terbuka*.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 08(02), 90–97. [file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article Text-3266-1-10-20210807 \(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article Text-3266-1-10-20210807 (2).pdf)
- Purba, S. (2017). analisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten airi. *Jurnal Ilmiah Kohesi Vol. 1 No. 1 April 2017*, 1(1), 228–240.
- Silitonga, I. M., Siahaan, S. B., & Purba, S. (2022). Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 222–235. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i2.607>
- Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 91–101.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>